

TANAH DAN BANGUNAN – HAK – PEROLEHAN - HAK

2010

PERDAKAB. WONOSOBO NO. 12, LD. 2010/NO. 17, LL. SETDAKAB. WONOSOBO
: 30 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TENTANG BEA PEROLEHAN
HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN

ABSTRAK : - bahwa pajak daerah merupakan salah satu sumber pendapatan utama daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintahan daerah;

- bahwa agar pembangunan Daerah dalam berbagai aspek dapat ber jalan dengan lancar perlu ada kontribusi masyarakat, sekaligus meningkatkan pendapatan Daerah;
- bahwa sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf k Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan merupakan jenis pajak daerah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah : Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950; Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960; Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981; Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997; Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2000; Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002; Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008; Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004; Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009; Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010; Peraturan Pemerintah

Nomor 40 Tahun 1996; Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1998; Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000; Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005; Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007; Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010; Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 13 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 2 Tahun 2008; Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2008.

- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang : Nama, Objek, Subjek Dan Wajib Pajak; Dasar Pengenaan, Tarif Dan Cara Penghitungan Pajak; Wilayah Pemungutan; Saat Dan Tempat Pajak Yang Terutang; Pemungutan Pajak; Pembayaran Pajak; Pengembalian Kelebihan Pembayaran; Kedaluwarsa Penagihan; Ketentuan Bagi Pejabat; Pemeriksaan; Insentif Pemungutan; Ketentuan Khusus; Penyidikan; Ketentuan Pidana; Ketentuan Penutup

- CATATAN :
- Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2011
 - Penjelasan 12 halaman